

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

Oleh

Heny Rachmawati

NIM. C33213063



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh  
Heny Rachmawati  
NIM. C33213063

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heny Rachmawati

NIM : C33213063

Fakultas/Jurusan/  
prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana  
Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika  
untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang  
Republik Inonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya  
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



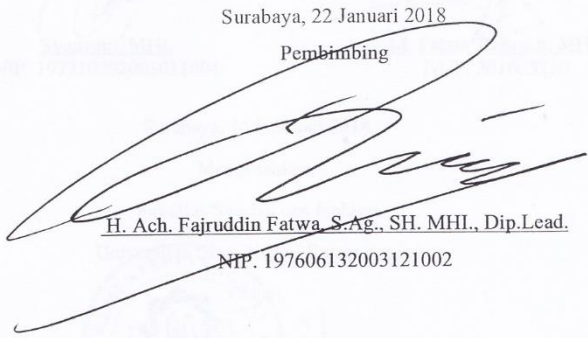
Heny Rachmawati  
NIM. C33213063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Heny Rachmawati NIM C33213063 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Januari 2018

Pembimbing

  
H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH. MHI., Dip.Lead.

NIP. 197606132003121002

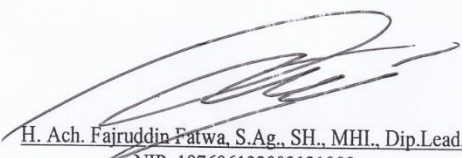
PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Heny Rachmawati NIM. C33213063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

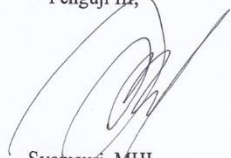
Penguji II,

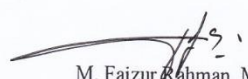
  
H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip.Lead.  
NIP. 197606132003121002

  
Drs. H. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003

Penguji III,

Penguji IV,

  
Syamsuri, MHI.  
NIP. 197210292005011004

  
M. Faizur Rahman, MHI.  
NUP. 201603310

Surabaya, 14 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.  
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Heny Rachmawati  
NIM : C33213063  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Hukum Islam  
E-mail address : henyrachmawati237@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BERDASAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2018

Penulis

(Heny Rachmawati)  
*nama terang dan tanda tangan*











































































Adanya perbuatan yang dilarang perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan selik. Bersifat melawan hukum yaitu:

- a) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.
  - b) Melawan hukum materiil artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan.
- 3) Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: setiap orang yang tanpa haka tau melwan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- 4) Unsur “narkotika golongan I berbentuk tanaman golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III”  
Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan 64 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan



















































































Penjelasan untuk Pasal 14 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 adalah bahwa pada Pasal tersebut memberi kewajiban:

1. Bagi dokter yang melakukan praktik pribadi untuk membuat laporan yang di dalamnya memuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika yang sudah melekat pada rekam medis yang disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun. Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.
2. Bagi badan usaha yaitu Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan bali pengobatan harus menyimpan catatan mengenai Narkotika. Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 14 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang berhak untuk menguasai narkotika adalah:

1. Insutri Farmasi
2. Pedagang besar Farmasi
3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah
4. Apotek















pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek. Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:

- a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Penyerahan narkotika kepada *end user* tidak bisa dilakukan oleh pihak lain dari yang telah ditentukan sebagaimana ketentuannya. Pada ayat (2), (3), (4), (5) Pasal 43 ini bahwa penyerahan narkotika pun telah ditentukan kepada siapa saja bisa diserahkan. Sehubungan dengan penyerahan obat yang mengandung narkotika, harus ada SE (Surat Edaran) Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM No. 366/EE/SE/1997 yang mengatur bahwa:

- a. Apotek dilarang melayani Salinan resep dari apotek lain yang mengandung narkotika, walaupun resep tersebut baru dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali.































pernah ada pada permulaan Islam. Bahkan tidak satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi yang membahas masalah tersebut. Pembahasan pada waktu itu hanya berkisar pada permasalahan *khamr* saja. Seperti disebutkan dalam Surat al-Ma'idah ayat 90:<sup>155</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan disebut *jarīmah*. *Jarīmah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*.<sup>156</sup>

*Jarīmah* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah *jarīmah qisās*, *jarīmah hudud*, dan *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah qisās* hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.<sup>157</sup>

<sup>155</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia arkanleema, 2007), 123.

<sup>156</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 1.

<sup>157</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000).

































- Idris, Imam Abul Abbas Ahmad bin, Penj. Ash-Shonhaji Al-Qorofi, *Al-Furuq: Anwarul Buruq Fi Anwa'il Furuq Kholil Al-Manshur*. Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut–Lebanon, 1998.
- Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2007.
- Mandagi, Jeanne dan M. Wresniwiro. *Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1999.
- Martono, Lydia Harlina. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat: Untuk Pembimbing dan Pecandu Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mujiono. *Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak di Bawah Umur : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*. Skripsi-- IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Moeljatno. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penj. Drs As'ad, Jilid 2. Jakarta: Gema Press, 1995.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2*. Jakarta: PT Tirta Asih Jaya, 2015.
- Resah Anika Maria. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanski Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1*. Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Saebani, Beni Achmad dan Januri. *Fiqh : Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Sudiro, Masruhi. *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2000.
- Sujono, A.R dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sulomo, Rachmad. *Bahaya Narkoba: Kamus Narkoba*. Jakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djembatan, 2001.
- Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Suwandi. "Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam", *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kotemporer, penj. Drs As'ad, Jilid 2 (Jakarta: Gema Press, 1995), 792. (Maret, 2005).
- Sofyan, Andi dan Nur Aziza. *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Syukur, Abdul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika: Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05-K/PM 1-07/AD/1/2012*. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Usman, Mukhlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.
- Wibowo, Andik. *Kesehatan Masyarakat di Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Yafie, Alie. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu Wardi Muslich, tth.
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/02/14324761/tanam.ganja.untuk.pengobatan.istri.fidelis.tak.seharusnya.ditangkap.dan.dibui>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017.
- [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id), di akses pada tanggal 28 November 2017.